

Facebook Ancam Tutup Konten Berita di Kanada jika UU Bayar Media Diresmikan

tengah menyiapkan 'Undang-Undang (UU) Berita Online' dalam waktu dekat. Namun aturan tersebut tampaknya tidak disukai oleh Meta, induk Facebook. Raksasa media sosial itu malah mengancam akan menyetop akses konten berita untuk warga Kanada di , jika aturan tersebut disahkan. Lalu, apa itu UU Berita Online? Undang-Undang Berita Online, atau pemerintah Kanada menyebutnya House of Commons C-18, merupakan aturan yang memaksa platform internet macam dan Alphabet, induk Google, untuk menegosiasikan kesepakatan komersial dan membayar media untuk konten beritanya. UU ini diperkenalkan pada April 2022 lalu. Keputusan Meta mendapat respons dari pemerintah Kanada. Menteri Warisan Kanada Pablo Rodriguez mengaku sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang tidak memiliki itikad baik untuk bekerja sama dengan media lokal, malah mengancam menghentikan distribusi konten berita di Facebook Kanada. Rodriguez menambahkan, rancangan aturan C-18 tidak ada hubungannya dengan bagaimana Facebook membuat berita tersedia untuk Kanada. "Yang kami minta Facebook lakukan adalah menegosiasikan kesepakatan yang adil dengan kantor berita ketika mereka mendapat untung dari pekerjaan mereka (media)," katanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (14/3). Sebelumnya, Google sudah mulai membatasi konten berita di platformnya di Kanada pada Februari 2023 lalu. Pembatasan ini merupakan responsnya terhadap aturan yang masih dalam rancangan tersebut. Media di Kanada memang telah meminta pemerintah untuk mulai mengatur perusahaan internet, agar industrinya dapat menutup kerugian finansial yang dialami selama beberapa tahun terakhir. Sebab, selama ini Google hingga Meta terus mendapat pangsa pasar periklanan yang lebih besar dibandingkan kantor berita. Aturan serupa juga tengah disiapkan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang berusaha merampungkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Right atau Hak Penerbit. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, rancangan Perpres ini akan rampung pada Maret 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan pemerintah masih punya waktu sebulan

lagi untuk menyelesaikan Rancangan Perpres yang mewajibkan platform media iklan online seperti Google hingga Meta membayar konten berita ke media massa di Indonesia. Perpres ini ditargetkan dapat mengatur kerja sama dan memberikan titik keseimbangan yang sehat antara platform seperti Meta dan Google dengan perusahaan media yang memproduksi konten berita jurnalisme kepada pembaca. "Perpres ini kami harapkan akan menciptakan fair playing field antara platform digital dengan media-media di Indonesia," jelas Usman kepada kumparan, Rabu (15/2). "Perpres ini akan menciptakan ekosistem media yang sehat... melalui kerja sama antara platform digital dengan media-media di Indonesia."